

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN ANGGANA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
2024**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Anggana Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Anggana disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anggana Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Anggana Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Anggana kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang

Anggana, 17 Februari 2024

Rendra Abadi, S.STP, M.Adm.KP
Pembina Tingkat I
NIP 198409222003121001





DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | v |
| Daftar Gambar | vi |
| Daftar Grafik | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum | 2 |
| C. Struktur Organisasi | 7 |
| D. Tugas Pokok dan Fungsi | 8 |
| E. Sumber Daya Aparatur | 9 |
| F. Sumber Daya Keuangan | 11 |
| G. Isu-Isu Strategis | 11 |
| H. Sistematika Laporan Kinerja | 13 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA | 14 |
| A. Perencanaan Kinerja | 14 |
| 1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah | 14 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 15 |
| 3. Strategi | 15 |
| 4. Arah Kebijakan | 16 |
| 5. Program | 17 |
| B. Perjanjian Kinerja | 17 |
| C. Alokasi Anggaran Tahun 2024 | 30 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 31 |
| A. Capaian Kinerja | 32 |
| 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 33 |
| 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya | 52 |



| | | |
|-----------------------|---|----|
| | | |
| 3 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Anggana (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional. | 66 |
| 4 | Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran | 71 |
| | | |
| B. | Realisasi Anggaran | 83 |
| BAB IV Penutup | | |
| A | Kesimpulan dan Saran | 97 |
| | | |
| LAMPIRAN | | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Anggana | 5 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Penduduk Kecamatan Anggana Tahun 2024..... | 6 |
| Tabel 1.3 | PNS Berdasarkan Pendidikan..... | 10 |
| Tabel 1.4 | PNS Berdasarkan Golongan | 10 |
| Tabel 2.1 | Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran..... | 15 |
| Tabel 2.2 | Strategi dan Arah Kebijakan..... | 16 |
| Tabel 2.3 | Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 18 |
| Tabel 2.5 | Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026 | 25 |
| Tabel 2.6 | Alokasi Anggaran Kecamatan Anggana Tahun 2024 | 30 |
| | | |
| Tabel 3.2 | Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024..... | 31 |
| Tabel 3.3 | Analisis Hasil Survey | 35 |
| Tabel 3.4 | Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Anggana Tahun 2024 | 48 |
| Tabel 3.5 | Daftar Wajib LHKASN Kecamatan Anggana Tahun 2024 | 52 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya | 53 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya | 54 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024..... | 60 |
| Tabel 3.10 | Faktor Pendukung dan penghambat realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 | 68 |
| Tabel 3.11 | Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja 2024 | 81 |



| | | |
|-------------------|--|----|
| Tabel 3.12 | Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Anggana | 84 |
| Tabel 3.13 | Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Anggana | 90 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|--|---|
| Gambar 1.1 | Persentase luas wilayah Desa/Kecamatan | 4 |
|-------------------|--|---|

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-------------------|--|---|
| Grafik 1.2 | Persentase Luas wilayah Desa/Kecamatan | 4 |
|-------------------|--|---|



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Anggana dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anggana Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Anggana Tahun 2024;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Anggana Tahun 2024; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Anggana Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Anggana
2. Mendorong Kecamatan Anggana di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Anggana untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Anggana di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kecamatan Anggana merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kecamatan Anggana terletak antara 117°13' BT – 117°36' Bujur Timur dan 0°24'– 0°54' Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 1.798,80 km².

Secara administratif, Kecamatan Anggana berbatasan dengan:



- Sebelah utara : Kec Muara Badak
Sebelah timur : Selat Makassar
Sebelah selatan : Kecamatan Sanga Sanga dan Kec.Muara Jawa
Sebelah barat : Kota Samarinda

Wilayah Kecamatan Anggana terdiri dari 9 desa, diantaranya Desa Sungai Meriam, Desa Anggana, Desa Sidomulyo, Desa Kutai Lama, Desa Handil Terusan, Desa Sepatin, Desa Tanjung Berukang, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Sungai Meriam. Dari Depalan desa tersebut, 5 Desa di Darat dan 3 Desa di di wilayah Delta Mahakam yang berupa kepulauan Desa Sepatin merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan, yaitu 79 kilometer, sedangkan Desa Tani Baru berjarak 61 kilometer. Desa Muara Pantuan 41 Km Pada umumnya, semua desa yang ada di Kecamatan Anggana dapat ditempuh melalui jalan darat maupun jalan sungai dan laut.

Seluruh desa di Kecamatan Anggana terletak pada bantaran sungai. Salah satu sungai besar yang ada di Kecamatan Anggana, yaitu Sungai Mahakam yang terbentang dari muara selat makasar sampai ke wilayah Samarinda

Berdasar letak geografisnya, Iklim Kecamatan Anggana beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan per bulannya 201 mm dan rata- rata hari hujan berkisar 17,17 hari per bulan di tahun 2022.

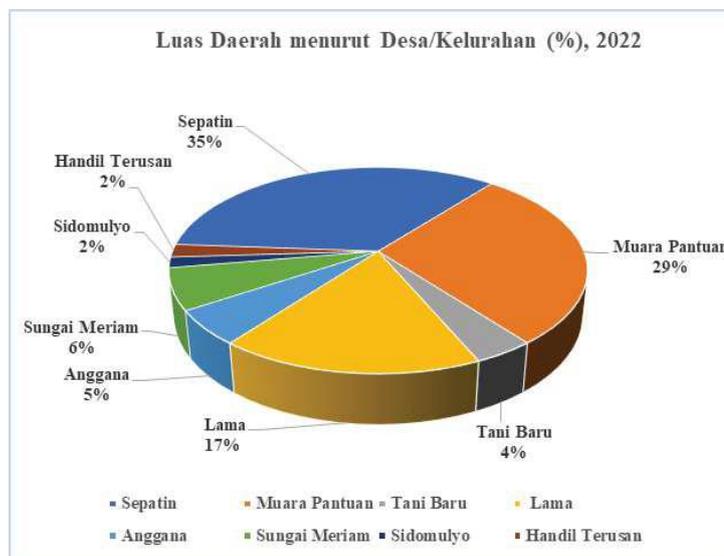
(sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2024)

Gambar 1.1 Persentase wilayah Desa /Kecamatan Anggana



Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di kecamatan Anggana sebagai berikut:

Grafik 1.2 Persentase Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Anggana





Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Anggana

| Desa/Kelurahan | | Luas (km ²) | Persentase (%) | Keterangan |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|
| [1] | | [2] | [3] | [4] |
| 1. | Sepatin | 624,87 | 34,74 | Desa |
| 2. | Muara Pantuan | 513,32 | 28,53 | Desa |
| 3. | Tani Baru | 71,50 | 3,97 | Desa |
| 4. | Kutai Lama | 308,95 | 17,18 | Desa |
| 5. | Anggana | 97,12 | 5,40 | Desa |
| 6. | Sungai Meriam | 116,54 | 6,48 | Desa |
| 7. | Sidomulyo | 30,00 | 1,67 | Desa |
| 8. | Handil Terusan | 36,50 | 2,03 | Desa |
| Jumlah | | 1.798,80 | 100,0 | |

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Anggana

Sasaran utama pembangunan nasional secara umum, dan Kecamatan Anggana secara khusus adalah menyangkut kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dicanangkan dalam setiap program pemerintah. Oleh sebab itu, data mengenai kependudukan sangatlah diperlukan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Penduduk Kecamatan Anggana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 36.619 orang yang terdiri dari 19.040 laki-laki (51,99%) dan 15.579 perempuan (48,01%) yang tersebar di 8 desa. Data jumlah penduduk ini diperoleh dari administrasi kependudukan yang ada pada desa yang bersangkutan. Secara umum persebaran penduduk di Kecamatan Anggana dapat dikatakan cukup merata di setiap desa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Sungai Meriam yang merupakan ibukota



kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 12.006 orang (33%), sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Tani Baru dengan jumlah penduduk sebanyak 2.107 orang (6%). Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Anggana per desa yaitu:

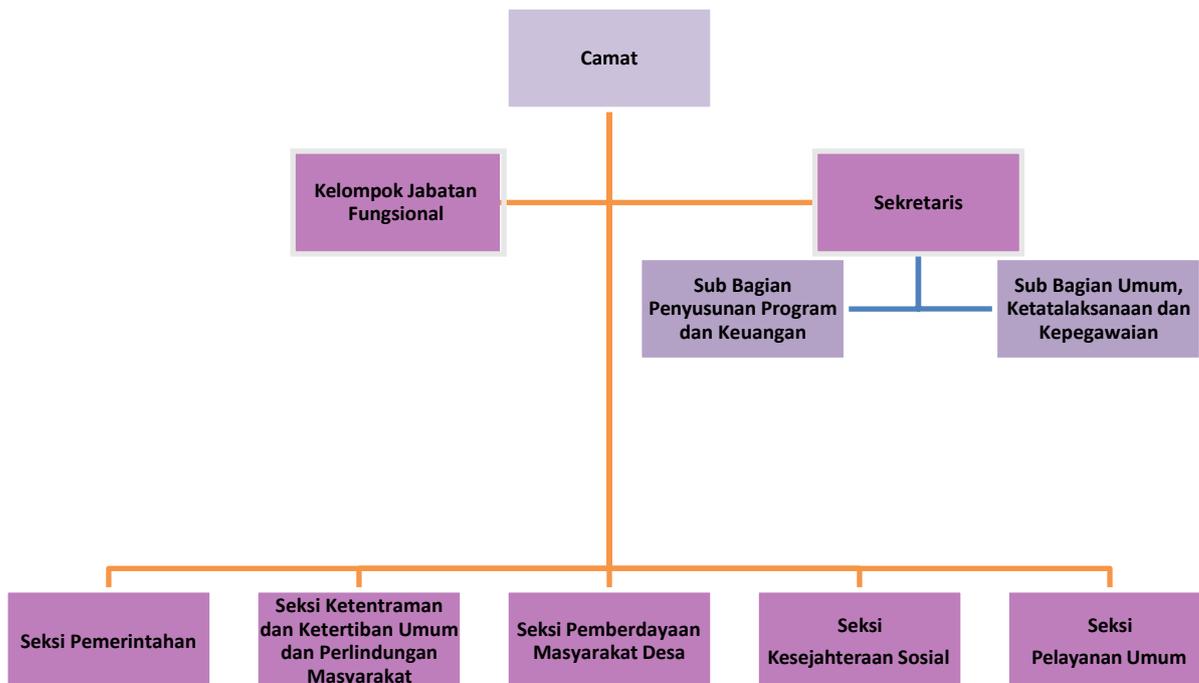
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Anggana Tahun 2024

| Desa/Kelurahan | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| [1] | | [2] | [3] | [4] |
| 1. | Sungai Meriam | 1.376 | 1.276 | 2.652 |
| 2. | Anggana | 356 | 318 | 674 |
| 3. | Sidomulyo | 1.757 | 1.608 | 3.365 |
| 4. | Kutai Lama | 2.306 | 2.013 | 4.319 |
| 5. | Handil Terusan | 1.504 | 1.284 | 2.788 |
| 6. | Sepatin | 1.066 | 974 | 2.040 |
| 7. | Muara Pantuan | 1.779 | 1.399 | 3.178 |
| 8. | Tani Baru | 1.714 | 1.560 | 3.274 |
| Jumlah Penduduk Tahun 2024 | | 15.290 | 13.461 | 28.751 |

Sumber Data: SIAK Kecamatan Anggana

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara





Pembentukan Kecamatan Anggana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun tugas pokok dari Perangkat Daerah Kecamatan Anggana yaitu :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan



tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi Utama

Fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan Anggana yaitu :

- Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data baserta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
- Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta LembagaKemasyarakatan

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Anggana per 31 Desember 2024 sebanyak 33 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:



1) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3. PNS Berdasarkan Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Proporsi |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | SLTP | 0 | - | 0 | 0% |
| 2 | SMA | 7 | 4 | 11 | 33% |
| 3 | SMEA | 0 | - | 0 | 0% |
| 4 | DIPLOMA III | 1 | 1 | 2 | 6% |
| 5 | S1 | 7 | 9 | 16 | 49% |
| 6 | S2 | 3 | 1 | 4 | 12% |
| Jumlah | | 18 | 15 | 33 | 100% |

2) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. PNS Berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Proporsi |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | I | 0 | - | 0 | 0% |
| 2 | II | 7 | 4 | 11 | 33% |
| 3 | III | 9 | 10 | 19 | 58% |
| 4 | IV | 2 | 1 | 3 | 9% |
| Jumlah | | 18 | 15 | 33 | 100% |



F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana pada Tahun 2024 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Anggana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.706.218.505,- yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Anggana dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance



and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Anggana pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Anggana. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Anggana adalah sebagai berikut :

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan Anggana dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat



H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anggana merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Anggana yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
- Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
- Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;

- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Anggana Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut

:

Tabel 2.1.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

| Visi : | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|---|
| "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia" | | | | |
| Misi yang Relevan | Tujuan | | Sasaran | |
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja |
| Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel | Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Publik kecamatan | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti |
| | | | | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | | | | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa |
| | | | | |

3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi SKPD

Kecamatan Anggana untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan SKPD Kantor Camat Anggana Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan

| No. | Strategi Kecamatan Anggana | Arah Kebijakan |
|-----|--|--|
| 1. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
| | | Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
| | | Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| 2. | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| 3. | Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | | Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |

| No. | Strategi Kecamatan Anggana | Arah Kebijakan |
|-----|---|---|
| 4. | Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| 5. | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 6. | Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan | Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah |

5. Program

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Kabupten Kutai Kartanegara untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program |
|--|---|---|
| Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |
| | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum |
| | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 |
| | | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 70 |
| | | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 50 |



| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|---|--|--------|--------|
| 2 | Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 | Persen | 100 |
| | | Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 | Persen | 100 |
| 3 | Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 |
| 4 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun | Persen | 100 |
| 5 | Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau | Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan | Persen | 100 |



| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 |
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya | Persen | 100 |
| 8 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 |
| 9 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 |
| 10 | Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun | Persen | 100 |



| | | | | |
|----|--|--|--------|-----|
| 11 | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100 |
| 12 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir: | Persen | 100 |
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan | Persen | 100 |
| 14 | Penerapan Core Values ASN Berakhlak | Internalisasi Core Values ASN Berakhlak | Persen | 100 |
| 15 | Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana | Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 |
| 16 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 70 |



| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 17 | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD | Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan | Persen | 100 |
| 18 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 19 | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 20 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 21 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 22 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Persen | 100 |
| 23 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset Tanah | Persen | 75 |
| 24 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah | Persen | 100 |
| 25 | Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah | Jumlah program pengentasan kemiskinan | Jumlah | 1 |



| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 26 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional | Persen | 14 |
| 27 | Pengarusutamaan Gender | Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender | Persen | 100 |
| 28 | Pengendalian Inflasi | Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% | Persen | 100 |
| 29 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan | Persen | 40 |
| 30 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 3,6 |
| 31 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Nilai | 73 |
| 32 | Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Nilai | 64 |
| 33 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 49,57 |



| | | | | |
|----|---|---|----------|------------|
| 34 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 8,95 |
| 35 | Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona Hijau |
| 36 | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape | Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 |
| 37 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Persen | 100 |
| 38 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 100 |
| 39 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 |

Sumber : PK Perubahan Kantor Camat Anggana 2024

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2024 jika dibandingkan dengan data awal atau capaian kinerja pada tahun 2024 serta dengan target akhir dari Renstra perangkat daerah Kecamatan Anggana tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.5.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Data Awal (2021) | Target 2024 | Target Akhir Renstra 2026 |
|-----|---|---|--------|------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 70 | 70 | 100 |
| | | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 | Persen | 100 | 100 | 100 |



| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Data Awal (2021) | Target 2024 | Target Akhir Renstra 2026 |
|-----|--|--|--------|------------------|-------------|---------------------------|
| 3 | Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau | Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian | Persen | 100 | 100 | 100 |



| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|-----|-----|
| | | Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | | | | |
| 10 | Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100 | 100 | 100 |



| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Data Awal (2021) | Target 2024 | Target Akhir Renstra 2026 |
|-----|--|--|--------|------------------|-------------|---------------------------|
| 12 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir: | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Penerapan Core Values ASN Berakhlak | Internalisasi Core Values ASN Berakhlak | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana | Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 70 | 70 | 100 |
| 17 | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD | Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 70 | 70 | 80 |
| 21 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N | Persen | 100 | 100 | 100 |



| | Lapor | Lapor | | | | |
|----|--|---|--------|-------|-------|-----|
| 23 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset Tanah | Persen | 75 | 75 | 100 |
| 24 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah | Jumlah program pengentasan kemiskinan | Jumlah | 1 | 1 | 100 |
| 26 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional | Persen | 14 | 14 | 100 |
| 27 | Pengarusutamaan Gender | Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Pengendalian Inflasi | Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan | Persen | 40 | 40 | 100 |
| 30 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 0 | 3,6 | 3,6 |
| 31 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Nilai | 73 | 73 | 100 |
| 32 | Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Nilai | 64 | 64 | 100 |
| 33 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 49,57 | 49,57 | 100 |



| | | | | | | |
|----|---|---|----------|------------|------------|------|
| 34 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
| 35 | Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona Hijau | Zona Hijau | 100 |
| 36 | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape | Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |

*) Data Tidak Tersedia

Sumber : Kantor Camat Anggana 2024

C. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pada tahun Anggaran 2024, Kecamatan Anggana melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp.53.048.947.504,-** dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2024 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar **Rp.60.706.218.505** ,-. Selanjutnya dapat kita lihat rincian penambahan alokasi anggaran Kantor Camat Anggana Tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Kecamatan Anggana Tahun 2024

| Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Alokasi Anggaran | Rp. 53.048.947.504 | Rp. 60.706.218.505 | Rp. 7.657.271.001 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta diuraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Anggana dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

- Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Interval Nilai | Kriteria Penilaian |
|----------------|--------------------|
| 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 66% ≤ 75% | Sedang |
| 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 50% | Sangat Rendah |

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
a. Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja **Tujuan Renstra** Kecamatan Anggana pada semester 2 tahun 2024 yaitu sebesar **93.36**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tujuan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian | Formulasi Perhitungan | Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja |
|-----|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel | Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Nilai | A (80) | A (93.36) | 116% | Sangat Tinggi | Realisasi dibagi dengan Target | Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang sudah ditetapkan dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Anggana terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. |

Sumber : Laporan IKM semester II Kantor Camat Anggana, 2024

Adapun penjelasan capaian dari indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

- **Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM)**

Salah satu indikasi pemerintahan yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator / agen pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai (evaluation) atau umpan balik (feedback) terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan (implementation) kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan survey berlangsung pada bulan Januari dan Desember Tahun 2024 (1 Tahun) terhadap seluruh bidang Pelayanan dan dilaporkan sebanyak 2 kali setahun (per semester). Sampel yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner kepada Responden yang mendapatkan pelayanan pada unit pelayanan Kantor Camat Anggana pada bulan pelaksanaan survey.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik, dimana pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Kesesuaian Persyaratan
2. Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Pelayanan
4. Kesesuaian/Kewajaran Biaya
5. Kesesuaian Pelayanan
6. Kompetensi Petugas
7. Perilaku petugas Pelayanan
8. Penanganan Pengaduan
9. Kualitas Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil survey diperoleh data yang dihimpun dari 420 (empat ratus dua puluh) orang responden, maka didapatkan nilai rata-rata dari 9 (sembilan) unsur pelayanan pada tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisa Hasil Survey

| No | Unsur Pelayanan | Indeks & Mutu Pelayanan |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. | Kesesuaian Persyaratan | 3,73 |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 3,72 |
| 3 | Kecepatan Pelayanan | 3,66 |
| 4 | Kesesuaian / kewajaran Biaya | 3,91 |
| 5 | Kesesuaian Pelayanan | 3,66 |
| 6 | Kompetensi petugas | 3,70 |
| 7 | Perilaku petugas Pelayanan | 3,76 |
| 8 | Penanganan Pengaduan | 3,82 |
| 9 | Kualitas sarana dan prasarana | 3,79 |
| Indeks Pelayanan | | 93,36 |
| Mutu Pelayanan | | A |
| Kinerja Unit Pelayanan | | Sangat Baik |

Sumber : Laporan SKM Semester II Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan” pada semester 2 tahun 2024 memperoleh nilai **93,36** dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **116%**, sehingga target kinerja **tercapai**. Hal-hal yang membuat target kinerja tercapai/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Anggana terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

1. Indikator Kinerja Utama (Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti)

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-1” tahun 2024 yaitu 100% dan realisasinya sebesar 100%, sehingga capaian target kinerja tercapai sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Dalam pencapaian target ini tentunya juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, lalu perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten. Tentunya beberapa kendala ini dapat ditangani dengan adanya penambahan perangkat dari Instansi terkait sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal, hasil ini dapat diklaim berhasil atau tercapai oleh Kecamatan Anggana yaitu dengan tidak adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2024.

2. Indikator Kinerja Utama (Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-2” tahun 2024 yaitu 70% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja pada indikator ke-2 sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hasil ini diperoleh dari selama Tahun 2024 yang dilaporkan oleh bagian trantib terjadi beberapa kasus gangguan keamanan dan semua kasus bisa dimediasi dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan terselesaikan dengan baik ini dikarenakan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri. Adapun kendala yang cukup mengganggu yaitu kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib.

3. Indikator Kinerja Utama (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa)

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada di wilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Target kinerja pada indikator ke-3 di tahun 2024 yaitu sebesar 50 dan untuk realisasinya sebesar 44, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **80 %** dengan predikat **Tinggi**. Faktor pendukung dari indikator ini adalah sudah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk setiap desa di Kecamatan Anggana, tetapi hasil yang diperoleh dari perhitungan pertumbuhan asli desa yang ada pada 8 desa di wilayah Kecamatan Anggana terjadi penurunan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa di Tahun 2024. Ada beberapa faktor penghambat yang mungkin menjadi kendala sehingga belum tercapainya target yaitu masih

lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal. Pencapaian target kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Anggana Tahun 2024

| No. | Desa | Jumlah Pendapatan Asli Desa | | | Ket |
|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Sungai Meriam | 0 | 161.293.800 | n.a | |
| 2 | Anggana | 0 | 18.178.590 | n.a | |
| 3 | Sidomulyo | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kutai Lama | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Handil Terusan | 39.678.925 | n.a | n.a | |
| 6 | Sepatin | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Muara Pantuan | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tani Baru | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah PAD | | 39.678.925 | 179.472.390 | 0 | |

Sumber : Kecamatan Anggana, 2024

Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa yang ada di wilayah Kecamatan Anggana untuk tahun hingga 2024 yaitu

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(PAD_n - PAD_{n-1})}{PAD_{n-1}} \times 100 \\
 &= \frac{(Rp. 179.472.390 - Rp. 39.678.925)}{Rp. 39.678.925} \times 100 \\
 &= 352 \%
 \end{aligned}$$

Adapun capaian kinerja untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli desa yaitu

$$\begin{aligned}
 &= \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \\
 &= \frac{352}{8} \times 100 \\
 &= 44 \%
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Tambahan

4.Indikator Kinerja Tambahan ke 4 (Tingkat Kepatuhan LHKPN dan LHKASN Per tanggal 31 Maret 2024)

Indikator Kinerja Tambahan (Target kinerja indikator tambahan ke-4 tahun 2024 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 9 pejabat struktural dan 8 Kepala Desa yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2024. Untuk indikator ke-4 diperoleh realisasi sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Hasil pelaporan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Daftar Wajib Lapor LHKPN Kecamatan Anggana 3.5

| No. | Jumlah Pegawai | Wajib Lapor | Sudah Lapor | Belum Lapor | Keterangan |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 33 Orang | 9 Orang | 9 Orang | 0 Orang | 100% |
| 2 | 8 Kepala Desa | 8 Orang | 8 Orang | 0 Orang | 100% |

Target kinerja indikator ke-5 tahun 2024 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 24 ASN yang menjadi target terdapat 24 ASN yang mengisi LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2024, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Kedepannya berdasarkan hasil

ketatalaksanaan dan kepegawaian akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan monitoring kepada seluruh ASN agar tingkat kepatuhan dalam melaporkan LHKASN terealisasi sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan. Hasil Pelaporan LHKASN Kantor Camat Anggana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6
Daftar Wajib LHKASN Kecamatan Anggana Tahun 2024

| No. | Jumlah Pegawai | Wajib Lapor | Sudah Lapor | Belum Lapor | Keterangan |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 33 Orang | 24 Orang | 24 Orang | 0 Orang | 100% |

5. Indikator Kinerja Tambahan (Mewujudkan tingkat kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-5 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari Persentase Penyampaian dan Pelaporan Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai dan terealisasi sebesar 100%, hasil ini diperoleh dari rekapitulasi SKP Tahun 2024 ASN Kantor Camat Anggana.(Paling Lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya)

6.Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya kepatuhan input SIRUP)

Target kinerja indikator tambahan ke-6 tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2024), Kecamatan Anggana sudah menginput seluruh kegiatan baik secara swakelola maupun pengadaan yang ada pada Dokumen. Link : lpe.kukarkab.go.id

Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Anggana Tahun 2024 di Aplikasi SIRUP melalui link <https://sirup.lkpp.go.id> sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

7. Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya kepatuhan input e pantau)

Target kinerja indikator tambahan ke-7 tahun 2024 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil laporan dari aplikasi e pantau dan keterisian per tanggal 10 setiap bulannya. Sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar **100 %** dengan kriteria penilaian **sangat tinggi** bisa dilihat pada link : <https://e-pantau.kukarkab.go.id>

8. Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD)

Target kinerja indikator ke-8 tahun 2024 yaitu sebesar 100%, berdasarkan ketetapan waktu pelaporan Usulan RKBMD Kecamatan Anggana yang di usulkan. Sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**

9. Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS /Standar Harga Satuan)

Target kinerja indikator tambahan ke-9 pada tahun 2024 yaitu ketepatan waktu penyampaian usulan SHS dengan Target 100% Kecamatan Anggana, capaian realisasi kinerja pada indikator ini sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Berdasarkan usulan yang telah disampaikan ke BPKAD bidang ASET

10. Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya ketepatan waktu Penyampaian LKJiP)

Target kinerja indikator tambahan ke-10 pada tahun 2024 yaitu ketepatan waktu penyampaian LKJiP hingga akhir Februari setiap tahun. Untuk indikator ketepatan waktu penyampaian LKJiP dengan target 100% Kecamatan Anggana Dapat dilihat di e-sakip.kukarkab.go.id.



10:21:53 Malam

Admin OPD
Kecamatan Anggana



Dashboard

Tahun 2024

Show 10 entries Search:

| NO | PERANGKAT DAERAH | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026 | RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | RENCANA KERJA (RENJA) | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | RENCANA AKSI (RENAKSI) | POHON KINERJA | PER KIN |
|----|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---------|
| 31 | Dinas Sosial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | Inspektorat Kabupaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | Kecamatan Anggana | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |

11. Indikator Kinerja Tambahan (ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD)

Indikator kinerja ke-11 yaitu Persentase ketepatan waktu penyampaian LK SKPD yang mana target pada tahun 2024 sebesar 100%. Target waktu penyampaian hingga per 24 Januari setiap tahun yaitu sudah **100%** sehingga target pada indikator ini mendapat kriteria **Sangat Tinggi**.

12. Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan SKM dan Laporan Tindak Lanjut /RTL perangkat Daerah)

Indikator Kinerja tambahan ke – 12 yaitu terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey kepuasan Masyarakat dan Tindak lanjut RTL Perangkat Daerah dengan target 100 %. Untuk tahun 2024 Kecamatan Anggana sudah menyampaikan Laporan SKM tepat waktu dengan capaian sesuai indikator sebesar **100 %** dengan kriteria penilaian **sangat baik**

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

| Uraian | Nilai Unsur Pelayanan | | | | | | | | | Total | Rata-rata |
|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | | |
| Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan | 1604 | 1599 | 1574 | 1680 | 1573 | 1591 | 1615 | 1642 | 1624 | 14502 | 1611.3 |
| NRR per Unsur Pelayanan | 3.739 | 3.727 | 3.669 | 3.916 | 3.667 | 3.709 | 3.765 | 3.828 | 3.786 | 33.806 | 3.756 |
| NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 3.71 | 0.412 |
| IKM Unit Pelayanan | 93.36 (A) Sangat Baik | | | | | | | | | | |

13.Indikator Kinerja Tambahan (meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik)

Indikator Kinerja tambahan ke – 13 yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan forum konsultasi publik Perangkat Daerah dengan target 100 %. Untuk tahun 2024 Kecamatan Anggana sudah melaksanakan forum konsultasi publik dengan capaian sesuai indikator sebesar **100 %** dengan kreteria penilaian **sangat baik**

14.Indikator Kinerja Tambahan (menyelesaikan Tindak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI)

Indikator kinerja tambahan ke-14 yaitu Tindak Lanjut Hasil Temuan adminstrasi dan kerugian BPK atas audit LKPD 5 Tahun Terakhir. Untuk tahun 2024 Kecamatan Anggana telah menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPD seluruhnya terlaksana dan terealisasi sebesar 100%, tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

15.Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian Laporan SPIP)

Indikator kinerja tambahan ke-15 yaitu Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penilaian Mandiri SPIP Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 pada kantor camat Anggana seluruhnya terlaksana dan persentase realisasi 100%untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh kantor camat Anggana sebesar **100 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

16. Indikator Kinerja Tambahan (Penerapan Core Values ASN

Indikator kinerja tambahan ke-16 yaitu Internalisasi Core Values ASN berakhlak dengan target 100%. Untuk penerapan Core Values ASN Berakhlak telah dilaksanakan. dengan sasaran Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, dan Tim budaya kerja. Untuk Tahun 2024 Kecamatan Anggana hanya melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur saja, dari 100 % target hanya terealisasi 100% . Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat sangat **Tinggi**

17. Indikator Kinerja Tambahan (Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana)

Indikator kinerja tambahan ke-17 yaitu Penyusunan Perjanjian kinerja sampai ke pelaksana. Untuk Tahun 2024 tidak dilaksanakan telah dilaksanakan penyusunan Perjanjian kinerja yang ada pada Kecamatan Anggana. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

18. Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan)

Indikator kinerja tambahan ke-18 yaitu dari jumlah serapan anggaran di SPD di Kecamatan Anggana dengan target 100%. Jadi ,untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **97,27%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

19. Indikator Kinerja Tambahan (Ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko)

Indikator kinerja tambahan ke- 19 yaitu Ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko. Untuk Tahun 2024 Kecamatan Anggana sudah membuat dokumen Manajemen Resiko

Baik melalui review maupun evaluasi dari inspektorat dan Bagian Pembangunan Setkab Kukar sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

20.Indikator Kinerja Tambahan Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah

Indikator kinerja tambahan ke- 20 yaitu Nilai Maturitas SPIP Untuk Tahun 2024 Kecamatan Anggana memperoleh nilai 100% dari target sebesar 100%. Data diperoleh dari hasil evaluasi Maturitas SPIP. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dari target yang ada dengan predikat **Sangat Tinggi**.

21.Indikator Kinerja Tambahan (Melaksanakan Tata Kelola Arsip)

Indikator kinerja tambahan ke-21 yaitu Melaksanakan tata Kelola Arsip Perangkat Daerah. Untuk Tahun 2024 Kecamatan Anggana memperoleh nilai 74,74 Data ini diperoleh dari Laporan Hasil Audit Dinas Kearsipan Kab.Kutai Kartenagara untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100 %** dari target yang ada dengan predikat **Sangat Tinggi**.

22.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke- 22 yaitu Nilai SAKIP kecamatan Anggana, target yang ditetapkan untuk nilai 70 , dan hasil dari laporan LHE Inspektorat untuk tahun 2023 sebesar 71,25 (BB) dan Tahun 2024 turun Menjadi 44,07 dengan kreteria C (Kurang). Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **62,7 %** dari target yang ada dengan predikat **Rendah**

23.Indikator Kinerja Tambahan (Peningkatan prestasi inovasi)

Indikator kinerja tambahan ke- 23 yaitu Peningkatan Presetasi inovasi di kecamatan Anggana, target yang ditetapkan yaitu sebesar 1 Kegiatan. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja yang diperoleh sebesar **0%** dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 0% dengan predikat **Sangat Rendah**.

24.Indikator Kinerja Tambahan (Persentase Tindak Lanjut SPAN Lapor)

Indikator kinerja tambahan ke-24 yaitu Persentase Tindak Lanjut SPAN Lapor di kecamatan Anggana, Diperoleh sebesar 100% dari target 100% atau dengan kata lain tidak ada pengaduan yang ditindak lanjuti kegiatan secara berkala, jadi untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja **Tinggi**

25.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Pengamanan Aset)

Indikator kinerja tambahan ke-25 yaitu pengamanan aset di kantor Kecamatan sebesar 75 % sudah tersedianya pencatatan aset, pendataan aset. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasikinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

26.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Tata Kelola Aset)

Indikator kinerja tambahan ke-26 yaitu pengamanan aset di kantor Kecamatan sudah tersedianya pencatatan aset, pendataan aset. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasikinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

27.Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya program pengentasan kemiskinan)

Indikator kinerja tambahan ke-27 yaitu terlaksananya program pengentasan kemiskinan dengan target 1 Kegiatan Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

28.Indikator Kinerja Tambahan (Menurunnya prevelensi stunting)

Indikator kinerja tambahan ke-28 yaitu menurunnya prevelensi stunting di Kecamatan Anggana dengan target 14 %. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 14,56% dengan predikat **Tinggi**.

29.Indikator Kinerja Tambahan (pengarusutamaan gender)

Indikator kinerja tambahan ke- 29 yaitu ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender target sebesar 100% Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

30.Indikator Kinerja Tambahan (Pengendalian Inflasi)

Indikator kinerja tambahan ke-30 yaitu Pengendalian Inflasi di Kecamatan Anggana belum melaksanakan dengan angka inflasi maksimal 1,5 -3,5 . Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja sebesar 0% dengan predikat **Sangat Rendah**

31.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan P3DN)

Indikator kinerja tambahan ke-31 yaitu Kepatuhan Pelaporan P3DN untuk Kecamatan Anggana telah dengan target 40 %. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 40% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

32.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke- 32 yaitu Target nilai LPPD Pemerintah Daerah adalah 3,6 . Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 3,1135 dengan predikat **Tinggi**.

<https://s.id/HasilPenilaianPemKabKUKAR>

33.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja)

Indikator kinerja tambahan ke-33 yaitu Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dengan Target Nilai 73 Tahun 2024 berdasarkan LHE AKIP . Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar Nilai 65,9 dengan predikat **Tinggi**

<https://s.id/HasilPenilaianPemKabKUKAR>

34.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang efektif, efesien, akuntabel, bersih dan melayani)

Indikator kinerja tambahan ke- 34 yaitu Indeks reformasi birokrasi dengan target nilai 64. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

<https://s.id/HasilPenilaianPemKabKUKAR>

35.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Inovasi Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-35 yaitu Meningkatkan Inovasi Daerah dengan target 49,57. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 61,74 atau 100% dengan predikat **Sangat tinggi**.

36.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik)

Indikator kinerja tambahan ke-36 yaitu Indeks Kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah dengan target 8,95. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi indeks 4,35 sebesar 48,60 % dengan predikat **Sedang**.

<https://s.id/HasilPenilaianPemKabKUKAR>

37.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik)

Indikator kinerja tambahan ke-37 yaitu Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan target nilai Zona Hijau Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi nilai Zona Hijau sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

<https://s.id/HasilPenilaianPemKabKUKAR>

38.Indikator Kinerja Tambahan (Terwujudnya Kawasan Tanpa rokok/Vape)

Indikator kinerja tambahan ke-38 yaitu terwujudnya kawasan tanpa rokok/vape di Kecamatan Anggana telah terlaksana dengan membuat peringatan dan himbauan larangan merokok/vape di kawasan kantor. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

39.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat)

Indikator kinerja tambahan ke- 39 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dapat di tunjukan dari Laporan SKM Kecamatan Anggana Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

40.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

Indikator kinerja tambahan ke-40 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Anggana blm di nilai dengan target 100%. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasikinerja sebesar 100 % dengan predikat **Tinggi**

41.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-41 yaitu Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2024 dari 100% . Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 100% (Tinggi) .

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Target Indikator Tujuan Kecamatan Anggana yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel. Realisasi kinerja Tujuan Kantor Camat Anggana tahun 2024 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan sebesar **93,36%**. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) dengan nilai indeks kepuasan sebesar **91,18%**. Terjadi kenaikan realisasi sebesar **2,18%**. Akan tetapi jika dibandingkan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar **133,37%** sedangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar **130,25%**. Ini terjadi peningkatan perolehan capaian kinerja sebesar **3,12%**. Adapun faktor pendukung dan kendala yang dihadapi unit pelayanan Kantor Camat Anggana yaitu hal ini disebabkan unit pelayanan Kecamatan Anggana terus berbenah, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Tentunya dengan hasil yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang muncul pada saat pelayanan diberikan, hambatan yang sering terjadi yaitu hilangnya jaringan komunikasi dan internet yang ada serta adanya pemadaman listrik yang cukup sering terjadi akibat dari faktor alam seperti hujan dan banjir yang melanda wilayah Kecamatan Anggana mengakibatkan jaringan listrik ada yang putus akibat tertimpa pohon tumbang dan lain sebagainya. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Keterangan | Capaian Kinerja | Keterangan |
|-----|---|-------------------------------------|--------|-------|--------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel | Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Nilai | 2021 | 70 | 86 | Meningkat | 122% | Meningkat |
| | | | | 2022 | 70 | 87 | Meningkat | 124% | Meningkat |
| | | | | 2023 | 70 | 91,18 | Meningkat | 130% | Meningkat |
| | | | | 2024 | 80 | 93,36 | Meningkat | 116% | Meningkat |

Sumber : Kantor Camat Anggana, 2024

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja sasaran Kantor Camat Anggana tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya terjadi sedikit peningkatan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang menjadi target kinerja Kecamatan Anggana pada tahun 2024 ini dan ada juga 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja tambahan yang menjadi target tambahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Ket. |
|-------------------------------------|--|--|--------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | |
| A Indikator Kinerja Utama | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 116% | Tetap |
| | | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 70 | 100 | 154% | 70 | 100 | 154% | Tetap |
| | | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 50 | 15 | 30% | 50 | 44 | 80% | Meningkat |
| B Indikator Kinerja Tambahan | | | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 2 | Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 3 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |



| No. | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Ket. |
|-----|---|------|--|------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------|
| | | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | |
| 4 | Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau | | Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 5 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Perse n | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 7 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP | | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 8 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| | | | | | | | | | | | |



| No. | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Ket. |
|-----|---|------|---|--------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------|
| | | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | |
| 9 | Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah | | Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 10 | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | | Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 11 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir: | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 12 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 13 | Penerapan Core Values ASN Berakhlak | | Internalisasi Core Values ASN Berakhlak | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 14 | Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana | | Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----------|
| 15 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 0 | 0 | 0 | 70 | 97,27 | 100 | Meningkat |
| 16 | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD | Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 17 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 18 | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 19 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 20 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Tetap |
| 21 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 22 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset Tanah | Persen | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | Tetap |
| 23 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 24 | Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah | Jumlah program pengentasan kemiskinan | Jumlah | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | Tetap |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|-----|-----|-----|------------|------------|-------|-----------|
| 25 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional | Persen | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,56 | 96 | Meningkat |
| 26 | Pengarusutamaan Gender | Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 27 | Pengendalian Inflasi | Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% | Persen | 0 | 0 | 0 | 1,5 -3,5 | 0 | 0 | Tetap |
| 28 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan | Persen | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | Tetap |
| 29 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3,115 | 100 | Tetap |
| 30 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Nilai | 70 | 70 | 100 | 73 | 65,9 | 62,7 | Menurun |
| 31 | Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Nilai | 0 | 0 | 0 | 64 | 60,12 | 93,9 | Menurun |
| 32 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 0 | 0 | 0 | 49,57 | 58,59 | 84,6 | Meningkat |
| 33 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 4,35 | 48,60 | Tetap |
| 34 | Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | 0 | 0 | 0 | Zona hijau | Zona Hijau | 100 | Tetap |
| 35 | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape | Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |



| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----------|
| | | | atau mempromosikan produk tembakau | | | | | | | | |
| 36 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | | IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Persen | 70 | 91,18 | 100 | 80 | 93,36 | 100 | Meningkat |
| 37 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 38 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | | Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tetap |

Sumber : Kantor Camat Anggana, 2024

Dari tabel realisasi kinerja diatas dapat kita lihat perbandingan pencapaian dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 baik itu indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja Kecamatan Anggana sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Kecamatan Anggana (Renstra PD) adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

| No. | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|-------------------------------------|--|------|---|--------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| A Indikator Kinerja Utama | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| | | | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 70 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| | | | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 50 | 44 | 80% | Tinggi |
| B Indikator Kinerja Tambahan | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |



| No. | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|-----|--|------|--|--------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 3 | Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 4 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 5 | Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 8 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP | | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 9 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |



| No. | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|-----|---|------|---|--------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 10 | Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah | | Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 11 | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | | Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 12 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir: | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 14 | Penerapan Core Values ASN Berakhlak | | Internalisasi Core Values ASN Berakhlak | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 15 | Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana | | Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 16 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 70 | 97,2 | 100% | Sangat Tinggi |
| 17 | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD | | Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |





| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--------|-------|-------|-------|---------------|
| 18 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 19 | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | | Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah | Nilai | 60-70 | 74,74 | 100% | Sangat Tinggi |
| 20 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 70 | 44,07 | 62,7% | Kurang |
| 21 | Peningkatan Prestasi Inovasi | | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 | 0 | 0% | Sangat rendah |
| 22 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporn | | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporn | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 23 | Meningkatnya Pengamanan Aset | | Pengamanan Aset Tanah | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 24 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | | Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 100% | Sangat Tinggi |
| 25 | Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah | | Jumlah program pengentasan kemiskinan | Jumlah | 1 | 1 | 100% | Sangat Tinggi |
| 26 | Menurunnya Prevalensi Stunting | | Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional | Persen | 14 | 14 | 100% | Sangat Tinggi |
| 27 | Pengarusutamaan Gender | | Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender | Persen | 100 | 100 | 100 | Tetap |



| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|----------|------------|------------|--------|---------|
| 28 | Pengendalian Inflasi | | Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% | Persen | 1,5 -3,5 | 0 | 0 | Tetap |
| 29 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan | Persen | 40 | 40 | 100 | Tetap |
| 30 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | Nilai LPPD | Nilai | 3,6 | 3,113 | 100 | Menurun |
| 31 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Nilai | 73 | 65,92 | 86,11% | Menurun |
| 32 | Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Nilai | 64 | 60,12 | 93,9 | Menurun |
| 33 | Meningkatnya Inovasi Daerah | | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 49,57 | 58,59 | 100 | Tetap |
| 34 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 8,95 | 8,95 | 100 | Tetap |
| 35 | Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona hijau | Zona Hijau | 100 | Tetap |
| 36 | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape | | Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 | 100 | 100 | Tetap |
| 37 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | | IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Nilai | 100 | 100 | 100 | Tetap |





| | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------------------|---------------------|--------|-----|-----|-------|-------|
| 38 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 100 | 73 | 73 | Tetap | |
| 39 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Daerah | Indikator Perangkat | Persen | 100 | 100 | 100 | Tetap |

33

Sumber : Kantor Camat Anggana, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat capaian realisasi kinerja Kecamatan Anggana terhadap target akhir rencana strategis (renstra) tahun 2026 secara keseluruhan mendapat rata-rata kriteria penilaian sangat tinggi, walaupun ada beberapa indikator yang masih sangat rendah kriteria penilaiannya.



(Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.

Realisasi target kinerja **Tujuan** Kecamatan Anggana pada semester2 tahun 2024 yaitu sebesar **93,36**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Baik**, hasil ini tentunya masih ada kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Anggana dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan nilai IKM Semester I Tahun 2024 yang ada pada kecamatan lain di wilayah Indonesia untuk tahun 2024 yaitu Kecamatan Denpasar Barat Pemkot Denpasar memperoleh nilai IKM sebesar **96,96** :

www.denbar.denpasarkota.go.id/public/uploads/pengumuman/pengumuman_242407020711_survey-kepuasan-masyarakat-kecamatan-denpasar-barat.pdf

Tabel





5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan Bupati tentunya ada faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan tidak terealisasinya target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan menurunnya kinerja perangkat daerah yang ada. Pada tahun 2024 ada beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

:

Tabel 3.10
Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|----------------------------------|--|---|--------|--------|-----------|-----------|--|--|
| A Indikator Kinerja Utama | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100% | Ada Penambahan Perangkat Dari Instansi Terkait. | Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten. |
| | | Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 70 | 70 | 100% | Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri. | Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib |
| | | Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 50 | 44 | 80% | Sudah Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk setiap desa di Kecamatan Anggana | Masih lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal |



| B Indikator Kinerja Tambahan | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------|-----|-----|------|--|-----------|
| 1 | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 | Jumlah | 1 | 1 | 100% | Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 | Tidak Ada |
| 2 | | Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 | Persen | 100 | 100 | 100% | Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 | Tidak Ada |
| 3 | Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Input Pada Aplikasi SIRUP Dilaksanakan Sesuai Jadwal. | Tidak Ada |



| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|----|---|--|--------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 4 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun Telah ditindaklanjuti | Tidak Ada |
| 5 | Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau | Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan | Persen | 100 | 100 | 100% | | Kurang Tersedianya Data Dukung Yang Diberikan Oleh Kasi dan PPTK Pengampu Kegiatan Sehingga Menyulitkan Petugas Dalam Melakukan Proses Input Pelaporan |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 | 100 | 100% | Data tersedia dan memadai | Tidak ada |
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya | Jumlah | 1 | 1 | 100% | Usulan telah diserahkan | Tidak ada |
| 8 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan | Persen | 100 | 100 | 100% | Pekerjaan terealisasi 100% | Waktu pengumpulan data |



| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-----|-----|------|----------------------------------|-----------|
| | | Februari setiap tahun | | | | | | |
| 9 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100% | Paket Pekerjaan Terealisasi 100% | Tidak Ada |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|----|---|---|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 10 | Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun | Laporan | 2 | 2 | 100% | Laporan SKM semester I dan II telah di tindak lanjuti dan diserahkan | Tidak Ada |
| 11 | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Tidak Ada | Tidak ada |
| 12 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir: | Persen | 100 | 100 | 100% | Laporan temuan telah ditindak lanjuti | Tidak ada |
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan | Persen | 100 | 100 | 100% | | Tidak Ada |
| 14 | Penerapan Core Values ASN Berakhlak | Internalisasi Core Values ASN Berakhlak | Persen | 100 | 100 | 100% | Kegiatan Yang Dilaksanakan Hanya Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur | Masih Kurangnya Pemahaman akan Core Values ASN "BERAHLAK" |
| 15 | Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana | Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 | 100 | 100% | Nilai Diperoleh PK yang disusun oleh Tim pelaksana | Tidak Ada |
| 16 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 100 | 100 | 100% | Nilai Diperoleh Laporan Realisasi Keuangan | Tidak Ada |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|-------|-------|--------|--|--|
| 17 | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD | Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan | Persen | 100 | 100 | 100% | Laporan MR per triwulan | Tidak ada |
| 18 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100% | Laporan Maturitas SPIP pada perangkat Daerah | Tidak ada |
| 19 | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah | Nilai | 60-70 | 74,74 | 100% | Tata kelola Arsip telah dilaksanakan dengan baik | Tidak ada |
| 20 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 70 | 44,07 | 62,95% | | Pengumpulan data pendukung dan SDM penyusunan SAKIP blm memahami |
| 21 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100% | | |
| 22 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Persen | 100 | 100 | 100% | Tidak ada pengaduan SPAN yang ditindak lanjuti | Tidak ada |
| 23 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset Tanah | Persen | 100 | 100 | 100% | | Tidak ada |
| 24 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 100% | | |
| 25 | Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah | Jumlah program pengentasan kemiskinan | Program | 1 | 1 | 100 | Program pendataan P3KE telah dilaksanakan | Tidak ada |
| 26 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional | Persen | 14 | 14,56 | 96% | | Kurangnya anggaran pendukung kegiatan |
| 27 | Pengarusutamaan Gender | Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender | Persen | 100 | 100 | 100% | | Tidak ada |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|------------|------------|--------|--|--------------|
| 28 | Pengendalian Inflasi | Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% | Persen | 1.5- 3,5 | 0 | 0% | | n.a |
| 29 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan | Persen | 100 | 100 | 100% | | Tidak ada |
| 30 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 3,6 | 3,1135 | 86,11% | | Target Pemda |
| 31 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Nilai | 73 | 65,92 | 90,30% | | Target Pemda |
| 32 | Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Nilai | 64 | 60,12 | 93,93% | | Tidak Ada |
| 33 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 40 | 58,59 | 100% | | Tidak Ada |
| 34 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 8,95 | 4,35 | 48,60% | | Tidak ada |
| 35 | Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona hijau | Zona Hijau | 100% | | Tidak ada |
| 36 | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape | Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 | 100 | 100% | | Tidak ada |
| 37 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Nilai | 80 | 93,36 | 100 | | Tidak ada |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana Tahun 2024



| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|-----|-------|--------|--------------|--|
| 38 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 73,59 | 73,59% | Target Pemda | |
| 39 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 | 70 | 70% | | Data belum memadai, pengumpulan data tidak tepat waktu |

Sumber : Kantor Camat Anggana 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana Tahun 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran dengan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian sasaran indikator kinerja utama dan sasaran indikator kinerja tambahan dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Anggana tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Program | Anggaran | Realisasi (Rp.) | % Realisasi | Ket. |
|----|--|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|---------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | 0,98% | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 53.330.736.001 | 52.492.184.802 | 98,42 | Efisien |
| 2 | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | 0,89% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.414.282.475 | 5.740.913.997 | 89,50% | Efisien |
| 3 | Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | | | | | | |
| 4 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | | | | | | |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana Tahun 2024

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 5 | Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau | | | | | | |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | | | | | | |
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | | | | | | |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana Tahun 2024





| No | Sasaran | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Program | Anggaran | Realisasi (Rp.) | % Realisasi | Ket. |
|----|---|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|---------|
| 8 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP | 9,36 | | 227.500.000 | 212.639.729 | 93,46% | Efisien |
| 9 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | | | | | | |
| 10 | Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah | | | | | | |
| 11 | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | | | | | | |
| 12 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | | | | | | |
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | | | | | | |
| 14 | Penerapan Core Value ASN Berakhlak | | | | | | |
| 15 | Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana | | | | | | |
| 16 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | | | | | | |



| | | | | | | | |
|----|--|-------|--|-------------|-------------|--------|---------|
| 17 | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD | | | | | | |
| 18 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | | | | | |
| 19 | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | 0,95% | | 15.000.000 | 14.339.000 | 95,59% | Efisien |
| 20 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 0,91% | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 169.000.029 | 155.226.000 | 91,84% | Efisien |
| 21 | Peningkatan Prestasi Inovasi | | | | | | |
| 22 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | | | | | | |
| 23 | Meningkatnya Pengamanan Aset | | | | | | |
| 24 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | | | | | | |
| 25 | Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah | 0,87% | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 395.000.000 | 346.865.500 | 87,81% | Efisien |
| 26 | Menurunnya Prevalensi Stunting | | | | | | |



| No | Sasaran | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Program | Anggaran | Realisasi (Rp.) | % Realisasi | Ket. |
|----|--|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|---------|
| 27 | Pengarusutamaan Gender | | | | | | |
| 28 | Pengendalian Inflasi | | | | | | |
| 29 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | 0,93 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 596.703.014 | 560.432.327 | 93,92% | Efisien |
| 30 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| 31 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | | | | |
| 32 | Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | | | | | | |
| 33 | Meningkatnya Inovasi Daerah | | | | | | |
| 34 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | | | |
| 35 | Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | | | | | | |
| 36 | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape | | | | | | |
| 37 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | | | | | | |



| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 38 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 39 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Analisis Program /Kegiatan pencapaian pernyataan kinerja 2024

| No | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-----------|------------------|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | 100 | 100% | SOP Tersedia | Rusaknya Peralatan Pendukung (Seperti Alat Perekaman E-KTP) Yang Memerlukan Perbaikan Cukup Lama Sehingga Menghambat Dalam Proses Pelayanan |

| No | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|----|---|--|--------|--------|-----------|-----------|---|--|
| | | Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan | Persen | 81,3 | 81,3 | 100% | Koordinasi Forkopimcam Dengan Pihak Swasta dan Instansi Terkait Terlaksana Dengan Baik Sehingga Proses Perbaikan Jalan Yang Rusak Dapat Segera Diperbaiki | Rusaknya Jalan Akibat Bencana Alam (Banjir) Sehingga Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Menurun |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif | Persen | 100 | 100 | 100% | Tingkat Antusias Warga Yang Cukup Tinggi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Masih Kurangnya Sosialisasi Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari Instansi Terkait |
| 3 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 100 | 100 | 100% | Rata-Rata Realisasi Serapan Anggaran DD dan ADD Seluruh Desa Di Wilayah Kecamatan Kembang Janggut Diatas 70% Sehingga Predikat Kategori Baik | Tidak Ada |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 73 | 44,07 | 62,7% | Data Realisasi dan Pendukung Yang Dibutuhkan Dalam Pelaporan Tersedia | Kurangnya Pengarsipan Berkas Secara Berkala, Sehingga Ada Beberapa Data Dukung Yang Diminta Tidak Dapat Dipenuhi |
| 5 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 100 | 100% | Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat terlaksana dengan baik karena koordinasi yang terjalin dengan baik | Tidak Ada |
| 6 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persen | 100 | 100 | 100% | Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Sesuai Jadwal | Tidak Ada |

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ada pada Kecamatan Anggana dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **97,27%**, dari pagu sebesar Rp.60.706.218.505,- dan terealisasi sebesar Rp.59.052.375.299,- yang terdiri dari 5 (Lima) program 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 realisasi anggaran sebesar Rp.72.018.867.557 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp.12.966.492.258,00. Adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel 3.15.
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Anggana

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|---|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 227.500.000 | 212.639.729 | 93,46% | 14.860.271 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 10.000.000 | 8.074.791 | 92,14% | 1.925.209 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.000.000 | 3.080.000 | 30,80% | 6.920.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 75.000.000 | 64.730.210 | 86,30% | 10.269.790 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.936.342.849 | 4.358.744.495 | 88,29% | 577.598.354 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.000.000 | 4.520.000 | 45,20% | 5.480.000 |



| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|---------|--|---|-------------|-------------|--------|---------------|
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 77.149.675 | 76.320.000 | 98,92% | 829.675 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5.000.000 | 4.190.000 | 83,80% | 810.000 |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 33.600.000 | 33.600.000 | 100% | 0 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000 | 44.675.000 | 89,35% | 5.325.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.000.000 | 49.953.000 | 99,90% | 47.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan | 5.000.000 | 3.883.500 | 77,67% | 1.116.500 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 152.986.937 | 152.870.000 | 99,92% | 116.937 |



| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|---------|--|--|-------------|-------------|--------|---------------|
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 15.000.000 | 14.339.000 | 95,59% | 661.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 405.160.000 | 371.183.131 | 91,61% | 33.976.869 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 191.543.014 | 189.159.196 | 98,75% | 2.383.818 |
| | | | | | | |



| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|---|---|---|----------------|----------------|--------|---------------|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000 | 41.173.845 | 82,34% | 8.826.155 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 110.000.000 | 107.778.100 | 97,98% | 2.221.900 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 7.01 . 7-01.0-00.0-00.14.0.0 . 2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 53.330.736.001 | 52.492.184.802 | 98,42% | 838.551.199 |



| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|--|---------------------------------------|---|-------------|-------------|--------|---------------|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 25.000.000 | 24.895.000 | 99,58% | 141.000 |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 370.000.000 | 322.006.500 | 87,00% | 47.993.500 |
| | | | | | | |



| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Kerukunan AntarSuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 372.200.000 | 295.345.000 | 79,35% | 76.885.000 |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 25.000.000 | 21.840.000 | 87,36% | 3.160.000 |
| | | | | | | |
| Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 49.000.029 | 42.226.000,00 | 86,17% | 6.774.029 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 120.000.000 | 113.000.000 | 94,16% | 7.000.000 |
| Jumlah | | | 60.706.218.505 | 59.052.375.299 | 97,27% | 1.653.843.206 |

Sumber : Kantor Camat Anggana, 2024



Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Anggana sebesar **95,82%**, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **97,27%** terjadi kenaikan sebesar **1,45%**. Adapun realisasi anggaran 2024 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.16.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Anggana

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | - Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 53.330.736.001 | 52.492.184.802 | 98,42% | 838.551.199 |
| | - Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 53.330.736.001 | 52.492.184.802 | 98,42% | 838.551.199 |
| | - Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 53.330.736.001 | 52.492.184.802 | 98,42% | 838.551.199 |
| | - | | | | | |
| | | | | | | |



| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya. | - Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 395.000.000 | 346.865.500 | 87,81% | 48.134.500 |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 395.000.000 | 346.865.500 | 87,81% | 48.134.500 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 25.000.000 | 24.895.000 | 99,58% | 141.000 |



| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 370.000.000 | 322.006.500 | 87,00% | 47.993.500 |
| Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah | - Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 169.000.029 | 155.226.000 | 91,84% | 13.774.029 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 169.000.029 | 155.226.000 | 91,84% | 13.774.029 |
| | | Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa | 49.000.029 | 42.226.000 | 86,17% | 6.774.029 |
| | | Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | 120.000.000 | 113.000.000 | 94,16% | 7.000.000 |
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. | - Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.414.282.475 | 5.740.913.997 | 89,50% | 673.368.478 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | - Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 227.500.000 | 212.639.729 | 93,46% | 14.860.271 |



| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| | - Pengamanan Bidang Tanah | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.000.000 | 8.074.791 | 92,14% | 1.925.209 |
| | - Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.000.000 | 3.080.000 | 30,80% | 6.920.000 |
| | - Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 75.000.000 | 64.730.210 | 86,30% | 10.269.790 |
| | - Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.023.492.524 | 4.439.584.495 | 88,37% | 583.908.029 |
| | - Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.936.342.849 | 4.358.744.495 | 88,29% | 577.598.354 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.000.000 | 4.520.000 | 45,20% | 5.480.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 77.149.675 | 76.320.000 | 98,92% | 829.675 |
| | | | | | | |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 38.600.000 | 37.790.000 | 97,90% | 810.000 |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5.000.000 | 4.190.000 | 83,80% | 810.000 |



| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 33.600.000 | 33.600.000 | 100% | 0 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 272.986.937 | 265.720.500 | 97,33% | 7.266.437 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000 | 44.675.000 | 89,35% | 5.325.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.000.000 | 49.953.000 | 99,90% | 47.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5.000.000 | 3.883.500 | 77,67% | 1.116.500 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 152.986.937 | 152.870.000 | 99,92% | 116.937 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 15.000.000 | 14.339.000 | 95,59% | 661.000 |



| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 596.703.014 | 560.432.327 | 93,92% | 36.360.687 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 405.160.000 | 371.183.131 | 91,61% | 33.976.869 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 191.543.014 | 189.159.196 | 98,75% | 2.383.818 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 160.000.000 | 148.951.945 | 93.09% | 11.048.055 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000 | 41.173.845 | 82,34% | 8.826.155 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 110.000.000 | 107.778.100 | 97.98% | 2.221.900 |



| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | | Jumlah | 60.706.218.505 | 59.052.375.299 | 97,27% | 1.653.843.206 |

Sumber : Kantor Camat Anggana, 2024.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana tahun 2024 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Anggana pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Anggana Tahun 2021-2026. Kecamatan Anggana telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Tahun 2024 dapat tercapai melebihi target yang sudah ada, hasil capaian per-indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Indikator Kinerja Utama

- a. Capaian Kinerja nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan diperoleh sebesar 116% (Sangat Tinggi) dari target Nilai 80 dan diperoleh nilai 93,36

2. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama

- a. Capaian kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti memperoleh nilai 100% (Sangat Tinggi).
- b. Capaian kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- c. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa sebesar 44%(Tinggi).

3. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tambahan

1. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2024 sebesar 100% (Sangat Tinggi).
2. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2024 sebesar 100% (Sangat Tinggi).
3. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP Per akhir bulan Februari sebesar 100% (Sangat Tinggi).
4. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun sebesar 100% (Sangat Tinggi)
5. Capaian Kinerja ketepatan waktu pelaporan input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
6. Capaian Kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan sebesar 100% (Sangat Tinggi)

7. Capaian Kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Sebesar 100% (Sangat Tinggi)
8. Capaian Kinerja Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP sebesar 100% (Sangat Tinggi)
9. Capaian Kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun sebesar 100% (Sangat tinggi)
10. Capaian Kinerja Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebesar 116% (Sangat Tinggi)
11. Capaian Kinerja Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit sebesar 100 % (Tinggi)
12. Capaian kinerja Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sebesar 100% (sangat Tinggi)
13. Capaian kinerja Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di TindakLanjuti sebesar 100% (Sangat Tinggi).
14. Capaian kinerja Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
15. Capaian kinerja Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja sebesar 100% (Tinggi)
16. Capaian Kinerja Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) sebesar 100% (Sangat Tinggi)
17. Capaian Kinerja Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit sebesar 100 % (sangat Tinggi)
18. Capaian kinerja Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari sebesar 100% (Sangat Tinggi)
19. Capaian kinerja Laporan Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
20. Capaian Kinerja Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
21. Capaian Kinerja Laporan SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100 % (Tinggi)
22. Capaian Prestasi Inovasi Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
23. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor sebesar 100% (Sangat Tinggi)
24. Capaian kinerja Pengamanan Aset Tanah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
25. Capaian Kinerja program pengentasan kemiskinan sebesar 100% (sangat Tinggi)
26. Capaian kinerja Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional sebesar 96% (Sangat Tinggi)
27. Capaian Kinerja Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender sebesar 100% (sangat Tinggi)
28. Capaian kinerja pengendalian Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% sebesar 0% (Sangat rendah)
29. Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
30. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD sebesar 100% (Sangat Tinggi)

31. Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah sebesar 65 % (Baik)
32. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 100% (Sangat tinggi)
33. Capaian indeks Inovasi Daerah sebesar 100% (Sangat tinggi)
34. Capaian Indeks Pelayanan publik pemerintah Daerah sebesar 48,60% (sedang)
35. Capaian kinerja Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah predikat Zona Hijau
36. Capaian Kinerja kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau sebesar 100% (sangat Tinggi)
37. Capaian kinerja IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) di Kecamatan Anggana sebesar 116% (Sangat Tinggi)
38. Capaian Kinerja Indeks Lingkungan Hidup sebesar 73% (Tinggi)
39. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)



Capaian kinerja Realisasi Anggaran tahun 2024 pun meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja realisasi anggaran Kecamatan Anggana sebesar 95,82% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 1,45%.

B. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan dalam memperbaiki kinerja yang belum tercapai atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Anggana akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian evaluasi SAKIP,
- Terkait predikat pengelolaan arsip perangkat daerah Kecamatan Anggana yang sudah memenuhi target maka akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait tata cara pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Dimana selama ini Kecamatan Anggana banyak mengalami kendala dalam penyusunan dokumen dan evaluasi kinerja yang berhubungan dengan SAKIP. Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Anggana dalam menyusun SAKIP (IKU dan IKI) karena kurangnya sumber daya manusia, dalam bidang kearsipan tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.
- melaporkan harta kekayaan di aplikasi LHKASN sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.



Anggana, 17 Februari 2024
Camat Anggana

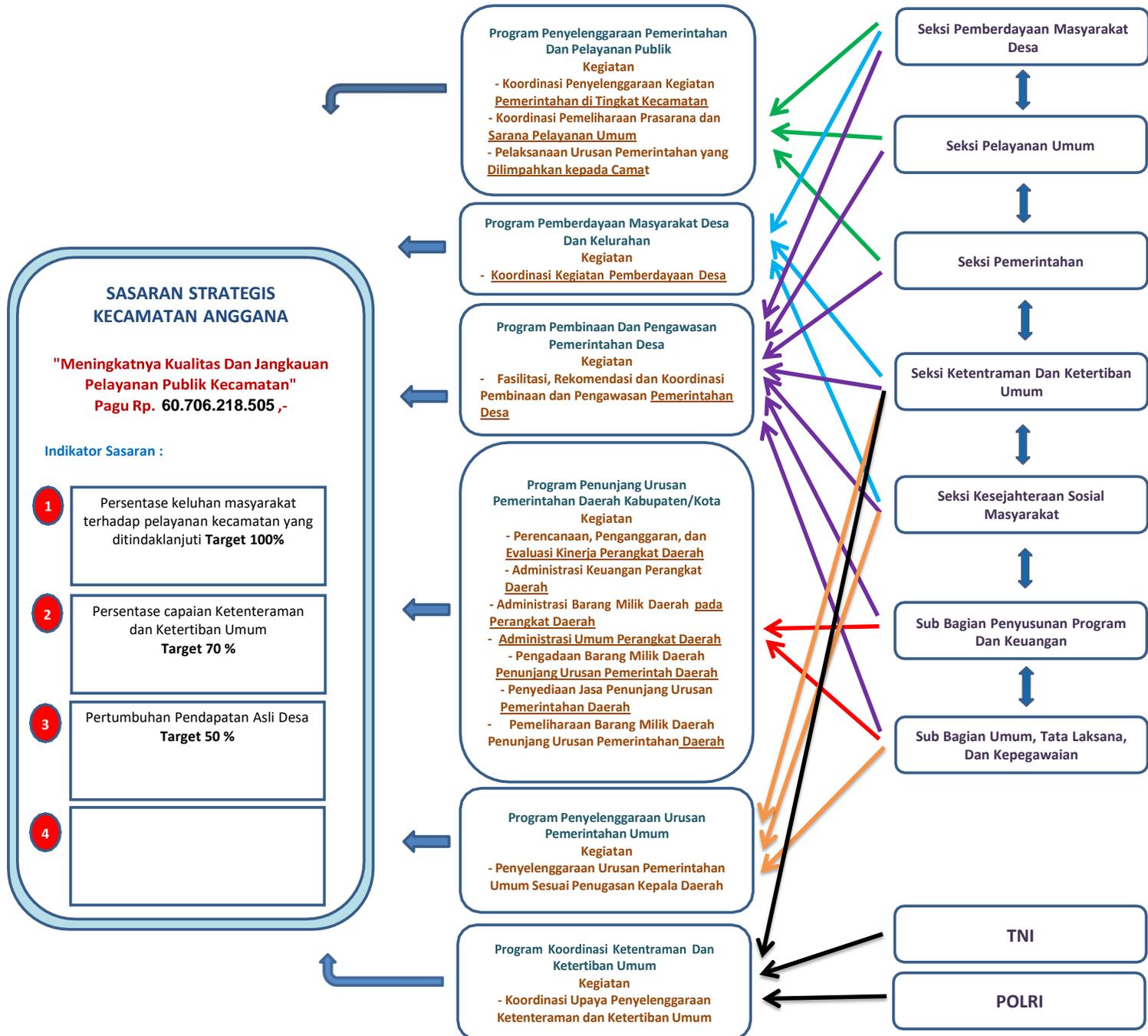
RENDRA ABADI, S.STP.,M.Adm.KP
NIP 198409222003121001



LAMPIRAN

LAMPIRAN





**DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PEMERINTAH KECAMATAN ANGGANA
TAHUN 2024**

| No | Jenis Penghargaan | Pemberi Penghargaan, Waktu Penerimaan |
|----|---|---|
| 1. | Pemerintah Kecamatan Anggana memperoleh nilai 74,74 dengan predikat B (Baik) pada Hasil Pengawasan Kearsipan Diseluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 14 Nopember 2024 |

DAFTAR PRESTASI DAN PENGHARGAAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini penting selain untuk menjalankan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, akan tetapi sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan juga ditentukan dengan kepuasan pelanggan yang mencakup pelanggan internal.

Laporan ini merupakan hasil survey pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan internal terhadap layanan di Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Survey ini mengkaji tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan pada periode bulan Juli s/d Oktober tahun 2024.

Semoga hasil survey ini dapat dijadikan bahan masukan dan menyempurnakan kebijakan perbaikan di Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hormat Kami,



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1. Latar Belakang | 4 |
| 1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat | 5 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| BAB II PENGUMPULAN DATA SKM | 7 |
| 2.1. Pelaksana SKM | 7 |
| 2.2. Metode Pengumpulan Data Pelaksanaan | 7 |
| 2.3. Lokasi Pengumpulan Data | 8 |
| 2.4. Waktu Pelaksanaan SKM | 8 |
| 2.5. Penentuan Jumlah Responden | 8 |
| BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM | 10 |
| 3.1. Jumlah Responden SKM | 10 |
| 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) ... | 13 |
| BAB IV ANALISIS HASIL SKM | 15 |
| 4.1. Analisis Permasalahan /Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan | 15 |
| 4.2. Rencana Tindak Lanjut | 15 |
| 4.3. Tren Nilai SKM | 16 |
| LAMPIRAN | 19 |
| Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM | 19 |
| (Foto-Foto Pelaksanaan SKM) | 19 |
| Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya (Contoh Template Laporan) | 20 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

2.2. Metode Pengumpulan Data Pelaksanaan

SKM menggunakan kuesioner Online melalui Aplikasi Survey Kukar yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit Pelayanan Kantor Camat Anggana pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut.

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor

Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu enam bulan adalah sebanyak **1095** orang.

| No. | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Hari Kerja |
|-----|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Persiapan | Juli 2024 | 7 |
| 2. | Pengumpulan Data | Juli - Oktober 2024 | 60 |
| 3. | Pengolahan Data dan Analisis Hasil | Oktober 2024 | 15 |
| 4. | Penyusunan dan Pelaporan Hasil | Oktober 2024 | 20 |

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah **420 orang**.

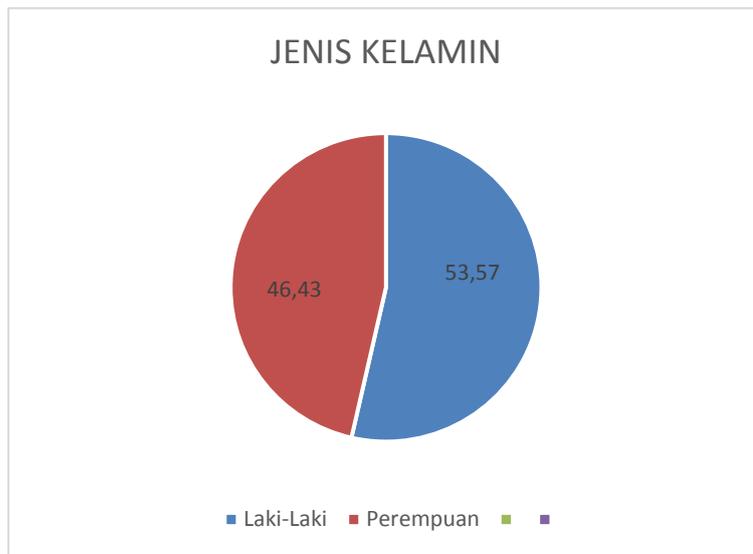
| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 10 | 10 | 220 | 140 | 1200 | 291 |
| 15 | 14 | 230 | 144 | 1300 | 297 |
| 20 | 19 | 240 | 148 | 1400 | 302 |
| 25 | 24 | 250 | 152 | 1500 | 306 |
| 30 | 28 | 260 | 155 | 1600 | 310 |
| 35 | 32 | 270 | 159 | 1700 | 313 |
| 40 | 36 | 280 | 162 | 1800 | 317 |
| 45 | 40 | 290 | 165 | 1900 | 320 |
| 50 | 44 | 300 | 169 | 2000 | 322 |
| 55 | 48 | 320 | 175 | 2200 | 327 |
| 60 | 52 | 340 | 181 | 2400 | 331 |
| 65 | 56 | 360 | 186 | 2600 | 335 |
| 70 | 59 | 380 | 191 | 2800 | 338 |
| 75 | 63 | 400 | 196 | 3000 | 341 |
| 80 | 66 | 420 | 201 | 3500 | 346 |
| 85 | 70 | 440 | 205 | 4000 | 351 |
| 90 | 73 | 460 | 210 | 4500 | 354 |
| 95 | 76 | 480 | 214 | 5000 | 357 |
| 100 | 80 | 500 | 217 | 6000 | 361 |
| 110 | 86 | 550 | 226 | 7000 | 364 |
| 120 | 92 | 600 | 234 | 8000 | 367 |
| 130 | 97 | 650 | 242 | 9000 | 368 |

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

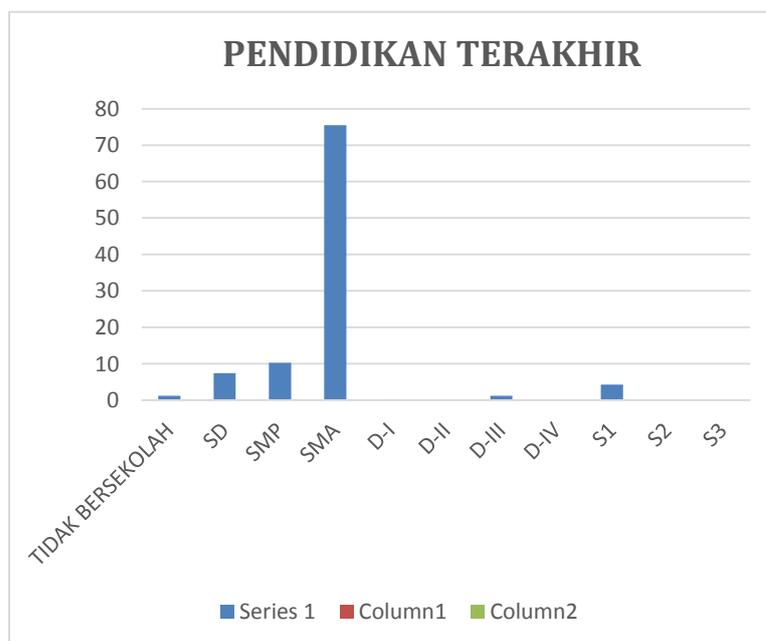
3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 420 orang responden yang terhimpun dalam beberapa aspek kriteria, dengan rincian sebagai berikut :

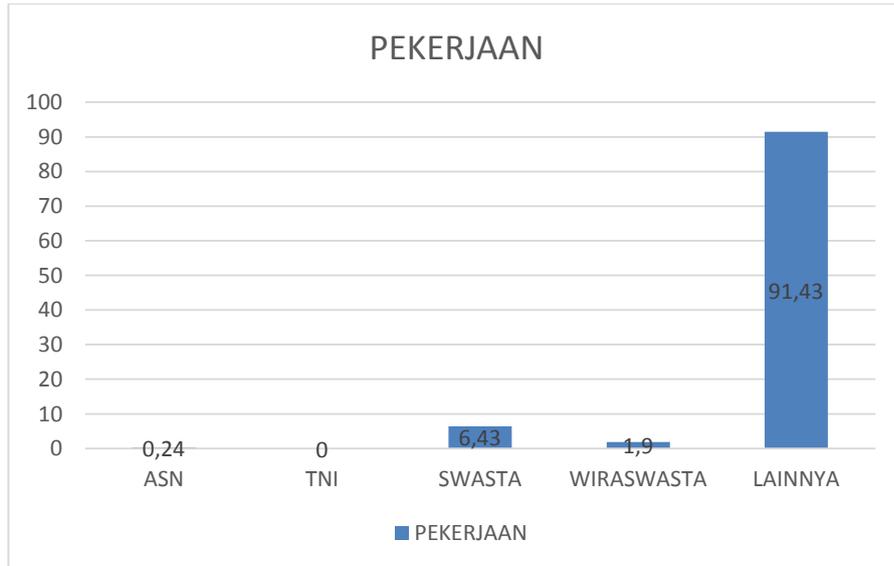
| No | Karakteristik | Indikator | Jumlah | % |
|----|---------------|-----------------------------------|--------|-------|
| 1 | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | 225 | 53.57 |
| | | PEREMPUAN | 195 | 46.43 |
| 2 | PENDIDIKAN | SD KE BAWAH | 5 | 1.19 |
| | | SD | 31 | 7.38 |
| | | SMP | 43 | 10.24 |
| | | SMA | 317 | 75.48 |
| | | D1 | 1 | 0.24 |
| | | D III | 5 | 1.19 |
| | | S1 | 18 | 4.29 |
| | | S2 | 0 | 0 |
| 3 | PEKERJAAN | ASN | 1 | 0.24 |
| | | TNI/POLRI | 0 | 0 |
| | | PEGAWAI SWASTA | 27 | 6.43 |
| | | WIRUSAHA | 8 | 1.9 |
| | | LAIN-LAIN | 384 | 91.43 |
| 4 | JENIS LAYANAN | Pembuatan Kartu Keluarga | 18 | 4.29 |
| | | Pembuatan AK 1 | 17 | 4.05 |
| | | Surat Dispensasi Nikah | 10 | 2.38 |
| | | Pengambilan KTP Elektronik | 111 | 26.43 |
| | | Surat Keterangan Ahli Waris | 2 | 0.48 |
| | | Legalisir Surat Ahli Waris | 2 | 0.48 |
| | | Pembuatan KTP | 235 | 55.95 |
| | | Pembuatan Biodata / KTP Sementara | 17 | 4.05 |
| | | Surat Keterangan Pindah | 4 | 0.95 |
| | | Perbaikan Kartu Keluarga dan KTP | 4 | 0.95 |



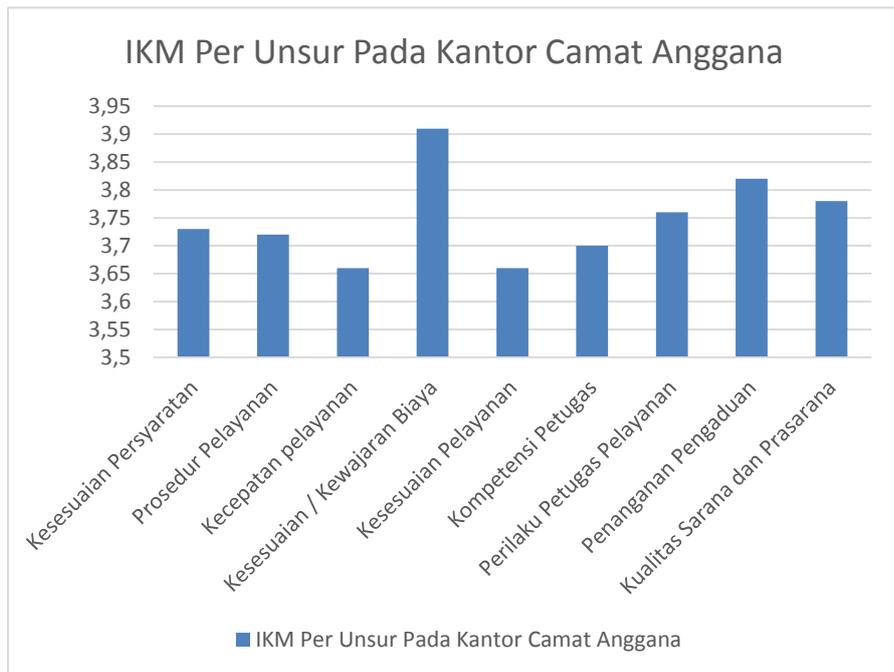
Grafik : Jenis Kelamin



Grafik : Pendidikan Terakhir



Grafik : Jenis Pekerjaan



Grafik : IKM Per Unsur pada Kantor Camat Anggana

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

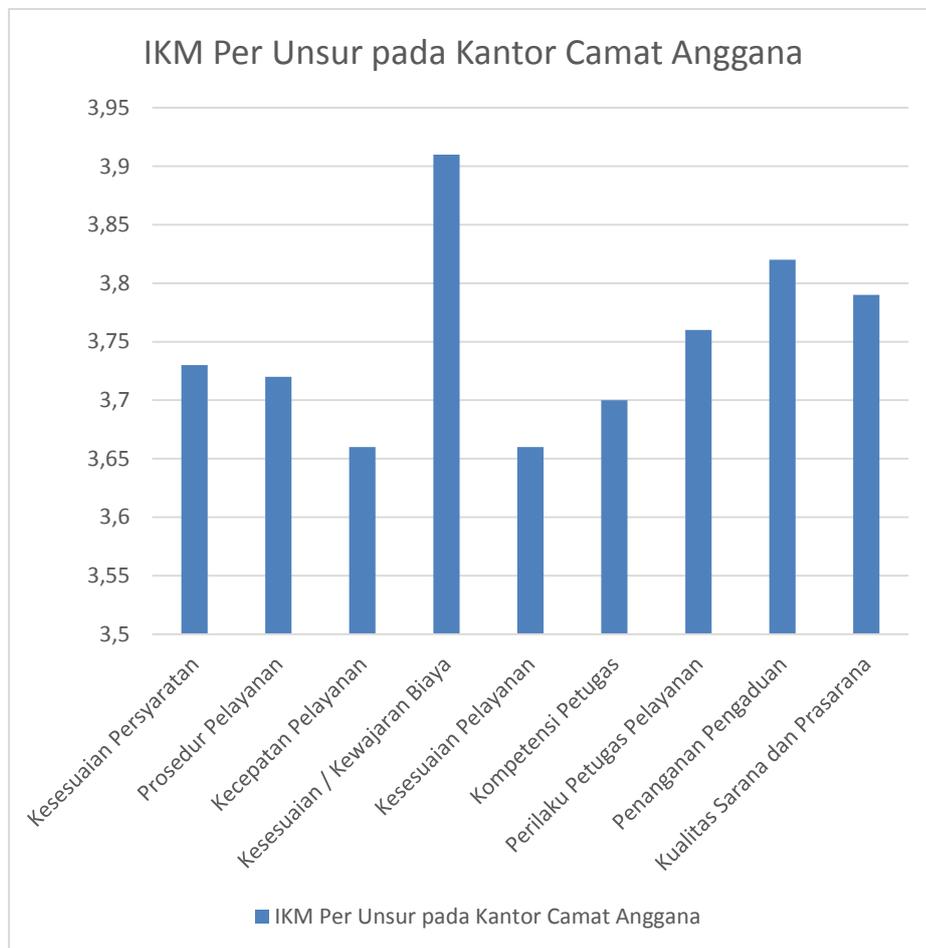
Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

| Uraian | Nilai Unsur Pelayanan | | | | | | | | | Total | Rata-rata |
|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | | |
| Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan | 1604 | 1599 | 1574 | 1680 | 1573 | 1591 | 1615 | 1642 | 1624 | 14502 | 1611.3 |
| NRR per Unsur Pelayanan | 3.739 | 3.727 | 3.669 | 3.916 | 3.667 | 3.709 | 3.765 | 3.828 | 3.786 | 33.806 | 3.756 |
| NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 3.71 | 0.412 |
| IKM Unit Pelayanan | 93.36 (A) Sangat Baik | | | | | | | | | | |

Tabel 2. Detail Nilai SKM Per Unsur

| No. | Unsur Pelayanan | Rata-rata |
|-----|-------------------------------|-----------|
| U1 | Kesesuaian Persyaratan | 3,73 |
| U2 | Prosedur Pelayanan | 3,72 |
| U3 | Kecepatan Pelayanan | 3,66 |
| U4 | Kesesuaian/ Kewajaran Biaya | 3,91 |
| U5 | Kesesuaian Pelayanan | 3,66 |
| U6 | Kompetensi Petugas | 3,70 |
| U7 | Perilaku Petugas Pelayanan | 3,76 |
| U8 | Penanganan Pengaduan | 3,82 |
| U9 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3,79 |

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan /Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Kesesuaian pelayanan mendapatkan nilai terendah selanjutnya kecepatan pelayanan yang mendapatkan nilai terendah kedua. Begitu juga Kompetensi Petugas termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kesesuaian /Kewajaran Biaya mendapatkan nilai tertinggi dari 6 unsur layanan

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Adapun kesesuaian pelayanan yang mendapatkan nilai terendah karena faktor jaringan online / terkendala dari sistem jaringan yang terkadang mengalami gangguan dan masih dalam kondisi yang wajar.
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui

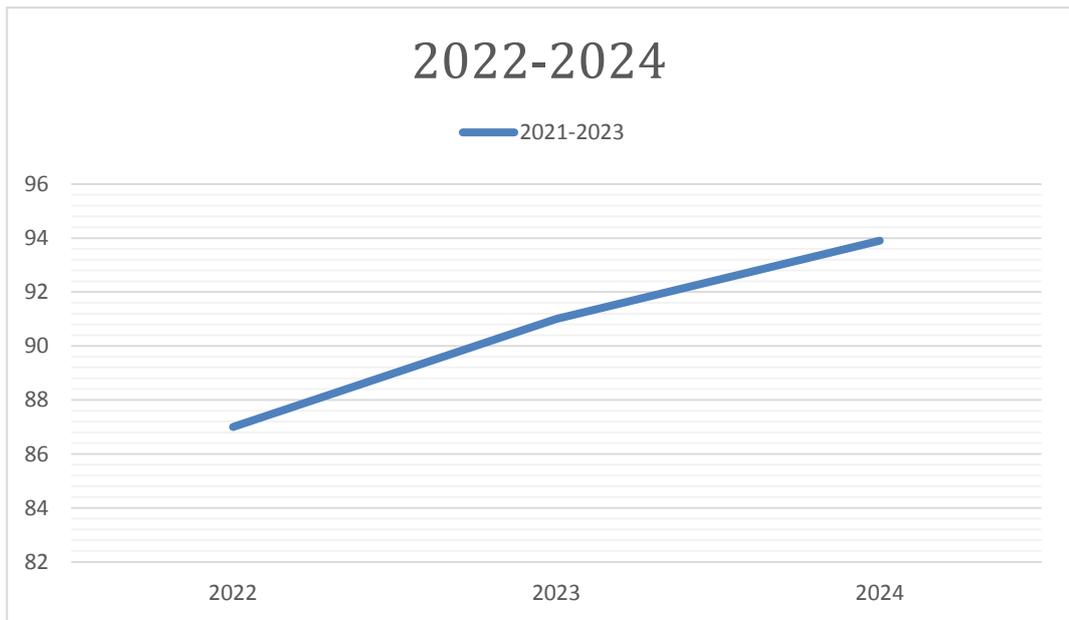
1. Memberikan sosialisasi secara langsung kepada Masyarakat yang berurusan bagaimana SOP dalam pengurusan dokumen kependudukan agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana prosedur dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang menggunakan sistem jaringan.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan
3. Penentuan peningkatan kepuasan masyarakat direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut peningkatan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

| No. | Prioritas Unsur | Rencana Tindak Lanjut | Waktu | | | | Penanggung Jawab |
|-----|---------------------|---|-------|-------|--------|-------|---------------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | Kecepatan Pelayanan | Peningkatan sosialisasi registrasi "online" | √ | √ | √ | | Kasi Pelayanan Umum |
| 2 | Prosedur Pelayanan | Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan | √ | √ | | | Kasi Pelayanan Umum |
| 3 | Kompetensi Petugas | Meningkatkan kompetensi petugas | | | | √ | Kasi Pelayanan Umum |

4.3. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat melalui grafik berikut :



Grafik . Nilai IKM per Tahun

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mulai Juli hingga Oktober 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dengan nilai SKM 93.9. Dengan demikian nilai SKM Kantor Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kesesuaian pelayanan, kecepatan pelayanan, serta kompetensi petugas.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk Biaya/tarif serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,83

Anggana, 28 Oktober 2024



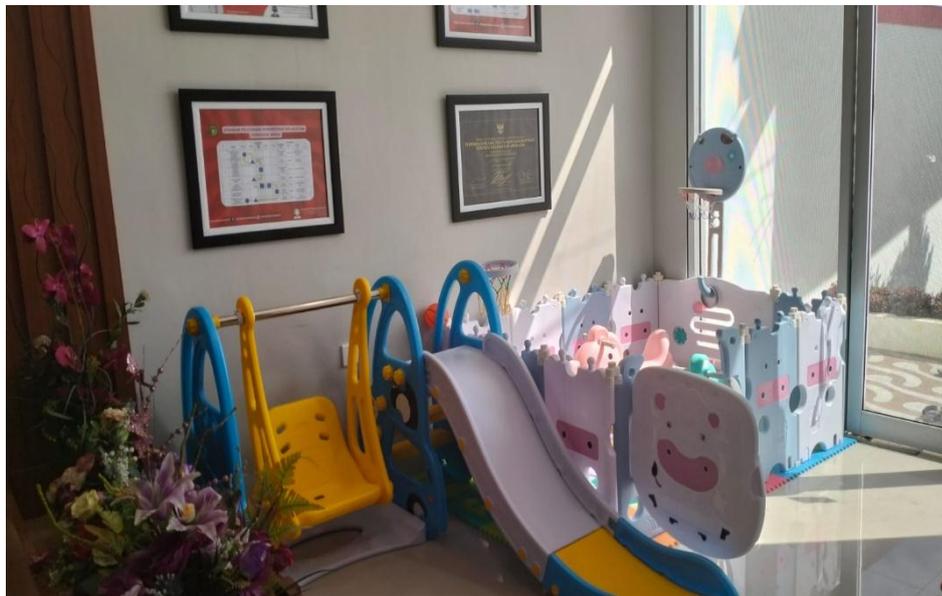
LAMPIRAN

Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya (Contoh Template Laporan)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan dan Arena Bermain Anak



Tahun 2024

■ % Stunting

